

**PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DALAM MENUNJANG KEGIATAN
EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN
KABUPATEN BATANG**

Mariana Kristiyanti

Universitas Maritim AMNI Semarang
email : mkristiyanti75@gmail.com

Sri Purwantini

Politeknik Ilmu Pelayaran
email : sri_purwantini@pip-semarang.ac.id

Wahyudi Santoso

Universitas Maritim AMNI Semarang
email : bpk.udi12@gmail.com

ABSTRAK

Pelabuhan merupakan sarana penting dalam menunjang perekonomian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah pesisir pantai yang ada di Indonesia. Batang merupakan salah satu daerah yang belum memiliki sarana perhubungan laut yang memadai. Hal ini menjadi salah satu penghambat perkembangan ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pimpinan daerah setempat. Dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi di Kabupaten Batang, maka perlu dilakukan perencanaan dan pembangunan fasilitas pelabuhan untuk menunjang pelayanan transportasi laut di daerah tersebut. Batang merupakan daerah yang belum memiliki prasarana transportasi laut yang layak. Dengan kurangnya prasarana transportasi laut, maka arus perpindahan barang/manusia keluar dan masuk di kabupaten tersebut menjadi tidak lancar sehingga daerah tersebut menjadi sulit untuk berkembang. Hal ini menuntut adanya pembangunan pelabuhan perikanan pantai di Batang tidak hanya untuk menunjang arus perpindahan barang/manusia, namun juga untuk menunjang kegiatan ekonomi warga setempat. Penelitian ini dimaksudkan untuk studi pengembangan pelabuhan perikanan pantai guna menunjang kegiatan ekonomi masyarakat nelayan di wilayah Kabupaten Batang. Metode pengambilan data yang digunakan yaitu dengan metode Wawancara, Observasi dan Studi literatur.

Kata kunci : Pengembangan, Pelabuhan perikanan pantai, Ekonomi masyarakat, Nelayan

ABSTRACT

Port is an important place in supporting economic and equal distribution of public welfare in coastal areas in Indonesia. Batang is an area that does not have adequate sea transportation facilities. This is one of the obstacles to economic development that needs to be paid attention to by local leaders. In order to support economic development in Kabupaten Batang, it is necessary to plan and construct port facilities to support sea transportation services in the area. With the lack of sea transport facilities, the outflow of goods / man (exit and entrance) in the district becomes smooth so that the area becomes difficult to develop. his requires the development of a coastal fishing port in Batang not only to support the flow of goods / people, but also to support the economic activities of local residents. This research is intended to study the development of a coastal fishing port to support the economic activities of the fishing community in Kabupaten Batang. The data collection method used is the interview method, observation and literature study.

Keywords : Development, Coastal fishing port, Local economy, Fishermen

Pendahuluan

Pelabuhan Rakyat atau disebut juga sebagai Pelra adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar termasuk Pinisi, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu. Namun, seiring dengan perkembangan kondisi pelabuhan yang ada di Indonesia, Sebutan untuk Pelabuhan Rakyat bergeser menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai yang memiliki karakteristik dan fungsi yang sama dengan Pelabuhan Rakyat.

Dalam menunjang perekonomian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia, dibutuhkan sarana transportasi laut yang memadai. Batang adalah salah satu daerah yang belum

memiliki sarana perhubungan laut yang layak. Hal ini menjadi salah satu penghambat perkembangan ekonomi yang perlu diperhatikan. Dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi di kota Batang, perlu dilakukan perencanaan dan pembangunan fasilitas pelabuhan untuk menunjang pelayanan transportasi laut di daerah tersebut.

Dengan kurangnya prasarana transportasi laut di kota Batang, maka arus perpindahan barang/manusia keluar dan masuk kota tersebut menjadi tidak lancar sehingga daerah tersebut menjadi sulit untuk berkembang. Hal ini menuntut adanya pembangunan pelabuhan laut yang tidak hanya untuk menunjang arus perpindahan barang/manusia, namun juga untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat setempat yang mayoritas adalah nelayan.

Keberadaan pelabuhan perikanan pantai di kota Batang, erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat sekitar sebagai penunjang kesejahteraan melalui kesempatan lapangan pekerjaan. Sektor perikanan adalah sektor yang cukup menjanjikan. Pengembangan sektor perikanan memberikan dampak positif pada perekonomian termasuk diantaranya adalah lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya (Eggert & Greker, 2009). Ini dikarenakan sektor perikanan sarat nilai ekonomis. Pemanfaatan peluang usaha dan kesempatan kerja akan meningkatkan pendapatan yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan produk-produk dan jasa yang disediakan oleh masyarakat itu sendiri. Kesejahteraan nelayan berkorelasi dengan aktivitas perikanan dan keuntungan yang didapatkan (Rees, Rodwell, Searle, & Bell, 2013).

Daerah pesisir adalah salah satu daerah yang tertinggal dilihat dari sisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah memiliki peran yang cukup kuat dalam pengambilan kebijakan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di daerah pesisir (Amarasinghe, 2005). Aktivitas pelabuhan serta dampaknya perlu diperhatikan mengingat pentingnya hal tersebut dalam perkembangan pelabuhan serta memastikan aktivitas perikanan kelautan tetap berlangsung demi menjaga kebutuhan akan perikanan serta pekerjaan bagi masyarakat guna menunjang kesejahteraan Masyarakat yang dalam hal ini adalah nelayan.

Menurut Suherman (2010) bahwa pembangunan pelabuhan perikanan bertujuan untuk membangun masyarakat pesisir guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, khususnya masyarakat nelayan. Pelabuhan berfungsi sebagai wadah transaksi antar nelayan dengan aktor perikanan lainnya. Keberadaan pelabuhan berdampak pada terbukanya lapangan kerja baru untuk melayani kebutuhan para pegawai/pekerja pelabuhan (Suherman & Dault, 2009). Kondisi ini menunjukkan bahwa wadah para nelayan dan pekerja terkait perikanan berupa pelabuhan perikanan pantai penting keberadaannya sebagai sarana penunjang kesejahteraan masyarakat Nelayan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai Kota Batang dengan waktu penelitian berlangsung antara bulan Juli-Oktober 2020 menggunakan metode pengambilan data melalui wawancara, observasi dan studi literatur.

1. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (*Interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Arikunto, 2006). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan petugas Syahbandar Kota Batang dan Kepala kantor Pelayanan Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor Batang.
2. Observasi diartikan sebagai pengamatan pencatatan sistematis dari fenomena- fenomena yang diselidiki (Usman, 2008). Observasi dilakukan secara non partisipan, dimana peneliti berperan hanya sebagai pengamat fenomena yang diteliti. Pengamatan dilakukan secara langsung untuk mendapatkan gambaran yang utuh terkait fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti mengadakan observasi langsung yaitu melakukan pengamatan di Pelabuhan Perikanan Pantai Kota Batang untuk mengamati kegiatan pelabuhan yang menunjang perekonomian masyarakat setempat yang mayoritas nelayan.
3. Studi Literatur : Usman (2008) mengemukakan bahwa hasil studi literatur bisa dijadikan masukan dan landasan dalam menjelaskan dan merinci masalah-masalah yang akan diteliti, termasuk juga memberi latar belakang mengapa masalah tadi penting diteliti. Studi Literatur yang digunakan pada penelitian ini berupa jurnal-jurnal dan buku2 yang membahas dan mengulas mengenai pelabuhan perikanan pantai dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Pembahasan

Pelabuhan Perikanan Pantai di kota Batang, merupakan pelabuhan perikanan yang memiliki kelas Pengumpulan Regional. Aktivitas di Pelabuhan Batang sangat padat, berdasarkan hasil wawancara diperoleh data bahwa pelabuhan Batang menampung sebanyak 870 kapal nelayan, sehingga lalu lintas pelabuhan sangat padat akibat kurang memadainya fasilitas yang tersedia di pelabuhan tersebut.

Pelabuhan perikanan memiliki fungsi utama antara lain sebagai tempat bertambat-labuhnya kapal perikanan, kegiatan pendaratan hasil tangkapan dan kegiatan pemuatan bahan kebutuhan melaut. Fungsi pelabuhan perikanan akan terlaksana dengan baik apabila dilengkapi dengan fasilitas pokok, yaitu dermaga dan kolam pelabuhan.

Dermaga dan kolam pelabuhan merupakan fasilitas pokok pelabuhan yang dapat men-dorong fasilitas lainnya untuk dikembangkan, dengan kata lain jika fasilitas pokok berkembang maka fasilitas lainnya akan ikut berkembang. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan fasilitas pokok pelabuhan perikanan. Hal ini diharapkan dapat mengembangkan fasilitas-fasilitas lainnya sehingga pelabuhan dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Kegiatan-kegiatan di pelabuhan harus pula didukung oleh prinsip-prinsip efektifitas dan efisien pelabuhan perikanan.

Efisiensi dan efektifitas pelabuhan dapat dilihat dari kecepatan pelayanan suatu pelabuhan dalam menangani kegiatan pendaratan hasil tangkapan dan pemuatan bahan kebutuhan melaut secara cepat. Dimana kapal-kapal melakukan pendaratan hasil tangkapan dan pemuatan bahan kebutuhan melaut, kemudian berangkat lagi tanpa disertai waktu tunggu yang lama untuk sandar pada tambatan dermaga. Fasilitas yang kurang memadai mengakibatkan bertambahnya waktu kapal di dermaga, sehingga biaya operasional kapal yang dikeluarkan akan bertambah besar untuk membayar waktu kerja yang tidak produktif. Selain itu kerugian yang didapat akan semakin besar akibat kualitas hasil tangkapan yang semakin menurun (Latief 2003).



Gambar 1. Aktivitas Nelayan Kota Batang
(Sumber : Hasil Observasi, Agustus 2020)

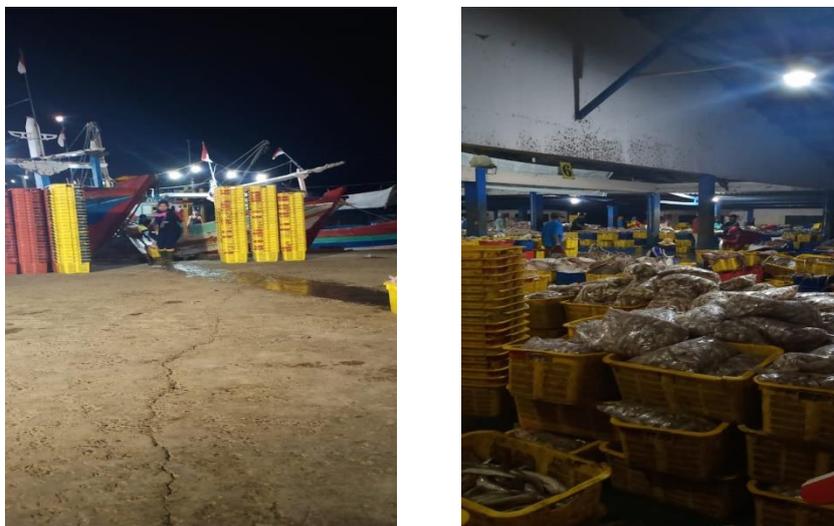
Pemerintah daerah Batang saat ini sedang mengarahkan kebijakan pada peningkatan perekonomian daerah pada sektor pangan. Salah satu pusat penggerak roda perekonomian pada sektor pangan adalah pelabuhan perikanan. Pelabuhan Perikanan Pantai Batang, saat ini sedang dalam upaya untuk dikembangkan untuk dapat layak menjadi salah satu pusat perekonomian utama di Kota Batang. Pemerintah daerah merencanakan pengembangan fasilitas- fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Batang dalam jangka panjang. Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Batang yang perlu dikembangkan adalah fasilitas pokok Pelabuhan Perikanan Pantai Batang, dikarenakan saat ini dirasakan masih sangat kurang memadai.

Aktivitas pendaratan hasil tangkapan dan pemuatan bahan perbekalan melaut di Pelabuhan Perikanan Pantai Batang sangat padat. Hal ini disebabkan minimnya ukuran dermaga dan kolam pelabuhan. Kurangnya panjang dermaga dan kolam pelabuhan menyebabkan padatnya antrian pada aktivitas pelayanan pendaratan hasil tangkapan dan pemuatan bahan perbekalan melaut. Menurut hasil wawancara, kepadatan aktivitas pendaratan hasil tangkapan dan pemuatan kebutuhan melaut di Pelabuhan Perikanan Pantai Batang di setiap tahun mengalami peningkatan aktivitas dan kepadatan pelayanan di pelabuhan yang semakin bertambah.



Gambar 2. Kapadatan Pelabuhan Perikanan Pantai Batang
(Sumber : Hasil Observasi, Agustus 2020)

Ukuran dermaga mempengaruhi jumlah dan ukuran kapal yang bertambat di pelabuhan. Hasil Observasi terhadap ukuran dermaga di lapangan menunjukkan ukuran dermaga Pelabuhan Perikanan Pantai Batang belum mencukupi kebutuhan yang ada saat ini. Ukuran panjang dermaga yang ada pada saat ini tidak mencukup dalam menampung jumlah kapal yang terdaftar di Pelabuhan Perikanan Pantai Batang yang mencapai 870 unit kapal. Kondisi ini menyebabkan sangat padatnya kegiatan antrian kapal yang menyebabkan tertundanya proses pendaratan hasil tangkapan dan pemuatan bahan kebutuhan melaut sehingga merugikan nelayan.



Gambar 3. Hasil Tangkapan Nelayan Kota Batang
(Sumber : Hasil Observasi, Agustus 2020)

Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Batang

Pengembangan pelabuhan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, diuraikan secara rinci dalam pasal-pasalnya, hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan pelabuhan pasal 89 s.d 93 serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut yang disempurnakan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, yang dirinci dalam pasal 74 s.d. 78, yang pada intinya bahwa Pengembangan pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan. Pengembangan pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin yang diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; Gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional, dan Bupati/Walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau. Permohonan izin pengembangan pelabuhan yang diajukan oleh penyelenggara pelabuhan harus disertai dokumen yang terdiri atas rencana induk pelabuhan, dokumen kelayakan, dokumen desain teknis dan dokumen lingkungan.

Pelabuhan Perikanan Pantai Batang merupakan pelabuhan kelas pengumpul regional yang telah berupaya untuk membuat rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Batang, akan tetapi sampai saat ini rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena berbagai kendala, salah satunya adalah kondisi Pandemi yang pada tahun 2020 ini belum juga berangsur dengan baik, namun kendala di tahun sebelumnya sebelum masa Pandemi diberlakukan adalah keterbatasan anggaran. Namun, saat ini pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Batang masih mengupayakan dan menginginkan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Batang untuk memberikan pelayanan yang prima ke pengguna pelabuhan (*stakeholder*).

Beberapa upaya pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Batang telah di persiapkan, diantaranya yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan fasilitas pelabuhan mengajukan penganggaran pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan oleh pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Batang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah,

- bahwa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan aset dan pembangunan di atas aset tersebut adalah pemilik aset, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Batang.
2. Membangun hubungan baik dengan membuat MoU antara pemerintah Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah.
 3. Diharapkan, kelas Pelabuhan Perikanan Pantai Batang naik statusnya menjadi pelabuhan perikanan kelas di atasnya, yaitu pelabuhan perikanan nusantara yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Batang karena diharapkan anggaran yang didapat bisa relatif besar. Lubis (2012) menjelaskan bahwa pengklasifikasian pelabuhan perikanan didasarkan pada kondisi yang ada sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pengembangan pelabuhan.
 4. Membangun fasilitas pelabuhan perikanan yang dibutuhkan karena sampai saat ini pihak pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Batang belum mampu memenuhi kebutuhan fasilitas yang dibutuhkan. Lubis dan Mardiana (2011) menjelaskan bahwa Jika fasilitas pelabuhan kurang ketersediannya bahkan tidak tersedia, maka akan menghambat kelancaran berbagai aktivitas di pelabuhan.
 5. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Batang mempertimbangkan ketersediaan fasilitas yang bertujuan untuk efisiensi anggaran, yaitu menetapkan prioritas fasilitas yang akan dibangun berdasarkan tingkat kebutuhannya.
 6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk penganggaran pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Batang. Koordinasi tersebut dilaksanakan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang dan pemerintah pusat sehingga diharapkan anggaran yang didapat akan lebih besar.
 7. Mengoptimalkan pelayanan terhadap pengguna pelabuhan agar kapal tetap masuk ke Pelabuhan Perikanan Pantai Batang dengan cara memaksimalkan potensi yang dimiliki Pelabuhan Perikanan Pantai Batang saat ini. Suherman (2011) menjelaskan bahwa pelayanan yang prima akan meningkatkan jumlah kunjungan kapal di pelabuhan perikanan.
 8. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk perawatan alur pelayaran dari laut ke muara Sungai kemudian ke Pelabuhan Perikanan Pantai Batang secara kontinu.

Peningkatan Kegiatan Ekonomi Nelayan

Hasil observasi menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai Batang tinggi hal ini terlihat dari banyaknya ikan yang di perdagangkan per harinya, yaitu sekitar 26 ton. Ikan-ikan tersebut kemudian didistribusikan ke berbagai daerah pemasaran (*hinterland*).

Aktivitas nelayan dalam mencari ikan dimulai pada pukul 04.30 dan berakhir/mendarat pada pukul 5.30. Setelah mendarat maka hasil tangkapan ikan langsung diturunkan di tempat pelelangan ikan sekitar pukul 5.30 sampai 07.00. Dengan aktivitas tersebut diharapkan akan semakin meningkat dengan adanya upaya untuk mengembangkan pelabuhan perikanan pantai. Keberadaan Pelabuhan Perikanan Pantai Batang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Batang. Setiap aktivitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai Batang memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat Batang. Pendapatan adalah indikator yang paling mempengaruhi terhadap tingkat kesejahteraan para nelayan. Pendapatan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan nelayan, semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan para nelayan. Begitu juga sebaliknya, untuk aktivitas nelayan dalam usaha dan aktivitas perdagangan dengan pendapatan yang rendah maka tingkat kesejahteraan juga akan rendah.

Penutup

Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Batang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, hal ini mengingat Aktivitas masyarakat nelayan di Batang sangat tinggi dalam memanfaatkan pelabuhan. Untuk meningkatkan fungsi pelabuhan perikanan dilakukan dengan banyak cara, salah satunya yaitu dengan membuat MoU antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah kabupaten Batang terkait pembangunan fasilitas pelabuhan yang dibutuhkan.

Kondisi fasilitas di Pelabuhan Perikanan Pantai Batang sebagian besar masih harus diperbaiki, dan pengecekan secara berkala harus ditingkatkan untuk kenyamanan para pengguna pelabuhan. Pengelolaan aktivitas dan fasilitas di Pelabuhan Perikanan Pantai terkendala dengan minimnya ukuran dermaga dan kolam pelabuhan. Kapal-kapal yang masuk terlihat tidak terstruktur dan membutuhkan waktu tunggu yang lama. Pelabuhan Perikanan Pantai Batang saat ini yang dibutuhkan adalah membangun fasilitas pelabuhan perikanan, Jika fasilitas pelabuhan baik maka berbagai

aktivitas di pelabuhan akan mengalami kelancaran dan hal ini akan berakibat dengan meningkatnya penghasilan nelayan dalam memperoleh hasil tangkapan ikan.

Daftar Pustaka

- Amarasinghe, O. (2005). *Social welfare and social security in Sri Lanka fisheries*. Retrieved from http://aquaticcommons.org/247/1/Sri_Lanka_Social_Security.pdf.
- Eggert, H. & Grecker M. (2009). Effects of global fisheries on developing countries possibilities for income and threat of depletion. *Environment for Development*, EfD DP 09-02. Retrieved from <http://www.rff.org/files/sharepoint/WorkImages/Download/EfD-DP-09-02.pdf>
- Latief A. (2003), Analisis Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut (Tesis) Bogor, Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor
- Lubis E, Mardiana N (2012), Peran Fasilitas PPI terhadap Kelancaran Aktivitas Pendaratan Ikan di Cituis Tanggerang. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*. 1(2): 1-8.
- Rees, S. E., Rodwell, L. D., Searle, S., & Bell, A. (2013). Identifying the issues and options for managing the social impacts of Marine Protected Areas on a small fishing community. *Fisheries Research*, 146, 51-58. doi:10.1016/j.fishres.2013.04.003.
- Suharsimi Arikunto (2006), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta)
- Suherman, A., & Dault, A. (2009). Dampak sosial ekonomi pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) pengembangan Jembrana Bali. *Jurnal Saintek Perikanan*, 4(2), 24-32.
- Suherman, A. (2010). Alternatif pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan Jawa Timur. *Jurnal Saintek Perikanan*, 5(2), 65-72
- Usman, Hussain & Akbar, Purnomo Setiyadi (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara, Jakarta.